Volume 3 No. 2 Juli 2023

ISSN 2355 - 5130

JURNAL KEADILAN

Nasib Tenaga Kerja Perempuan dan Anak Dibawah Umur (Ditinjau Dari Persepektif Agam Islam dan Hukum Azasi Manusia)..... 1-16
Ratmi Susiani Sagala, S.H., M.H. dan Hafizh Abdul Azis Ramadhany

Pandangan Hak Azasi Manusia Terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak di Lingkungan Pendidikan 17-31
Syafrizal, S.H., M.H. dan Annisa Suryani Putri

Tindak Pidana Kriminologi Kasus Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Sebagai Ancaman Perusak Generasi Bangsa 32-47
Alfiandi Wisudawansyah Nasution, S.H., M.H. dan Anisa Dwi Azura

Pembaharuan Agraria Mengatasi Ketimpangan Tanah dan Meningkatkan Keadilan Sosial..... 48-57
Abdul Azis Manurung, S.H., M.Kn. dan Phia Syafira

Penutupan Akses Penangkapan Ikan Bagi Negara Asing di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia..... 58-76
Emil Salim Siregar, S.H., M.H. dan Mazhar Fezliana

Dampak Kerusakan Lingungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl..... 77-89
Emil Salim Siregar, S.H., M.H. dan Ruanto Kusumo

Implementasi Kebijakan Surat Izin Usaha Perikanan..... 90-99
Emil Salim Siregar, S.H., M.H. dan Nizar Putra Lubis

Kebijakan Investasi di Beberapa Negara ASEAN..... 100-110
Emil Salim Siregar, S.H., M.H. dan Ica Zuniar Sari

DITERBITKAN OLEH :
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN

Kebijakan Investasi di Beberapa Negara ASEAN

Oleh:
Emiel Salim Siregar
Ica zuniar Sari
Edi Winardi
Arfi Yulian
Lintang Alfafaruq
Anugrah Jaya Halawa
Mhd Robi Azhari
budianto

Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jln. Jend. Ahmad Yani, Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Timur,
Kab. Asahan, Sumatera Utara 21216
Email: emielsalimsrg1988@gmail.com

ABSTRAK

Investasi merupakan aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari inilah investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Investasi asing merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan investor asing (luar negeri) untuk dapat melakukan usaha di negara lain. Investasi asing disebut juga Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi asing dapat menaikkan ekonomi di suatu negara, Negara ASEAN memiliki kebijakan masing-masing dalam mengatur tentang investasi yang ada dinegara nya, Investasi asing langsung ke negara-negara ASEAN menunjukkan perkembangan positif. Proporsi investasi asing terhadap Produk Domestik Bruto di Kamboja merupakan tertinggi di ASEAN setelah Singapura. Seperti halnya Vietnam, ongkos yang harus dikeluarkan investor di Kamboja dan Myanmar lebih murah daripada Indonesia dan Vietnam. Kebijakan investasi dibeberapa negara ASEAN juga berbeda dalam meningkatkan invetor assing seperti negara vietnam yang terus merevitalisasi kebijakan dan infrastruktur agar menjadi daya tarik bagi investor asing. Begitu juga dinegara lainnya termasuk indonesia sendiri yang memiliki kebijakan pada Undang-Undan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan juga indonesia juga mengadakan international infrastructure summit.

Kata Kunci : Investasi, Investasi Asing, Negara ASEAN

ABSTRACT

Investment is the activity of placing capital in the form of money or other valuable assets into an object, institution, or party in the hope that investors or investors will later get profits according to a certain period of time. It is because of the hope of getting profits in the future that investment is also known as investment. Foreign investment is an investment activity carried out by foreign (foreign) investors to be able to do business in other countries. Foreign investment is also called Foreign Direct Investment (FDI). Foreign investment can boost the economy in a country, ASEAN countries have their own policies in regulating investment in their countries, foreign direct investment to ASEAN countries shows positive developments. The proportion of foreign investment to Gross Domestic Product in Cambodia is the highest in ASEAN after Singapore. As with Vietnam, the costs that investors have to spend in Cambodia and Myanmar are cheaper than Indonesia and Vietnam. Investment policies in several ASEAN countries also differ in increasing investment assing such as Vietnam which continues to revitalize policies and infrastructure to become an attraction for foreign investors. Likewise, in other countries, including Indonesia itself, which has a policy in Law Number 25 of 2007 concerning Investment and also Indonesia also held an international infrastructure summit.

Keywords: Investment, Foreign Investment, ASEAN Countries

LATAR BELAKANG

Penanaman modal memiliki peran penting baik bagi penerima maupun bagi investor. Bagi negara berkembang modal asing berperan : Pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kedua, pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan struktur ekonomi dan perdagangan; ketiga, modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural; keempat, kebutuhan akan modal asing menjadi menurun setelah perubahan struktural benar-benar terjadi. Selain itu, bagi negara penerima modal, investasi asing dapat memberikan modal kerja, mendatangkan keahlian manajerial, ilmu pengetahuan, modal, koneksi pasar, serta tidak melahirkan utang baru

Investasi asing merupakan salah satu cara untuk menggenjot industri suatu negara. Ketika suatu negara harus meningkatkan produksi dan perekonomian dalam negeri, investasi asing merupakan satu hal yang bisa menjadi faktor pembeda. Hal inilah yang kemudian disadari oleh pemerintah Vietnam. Pada tahun 1987 Vietnam mengeluarkan undang-undang tentang investasi asing yang menjadi langkah awal Vietnam menjadi sangat terbuka terhadap pasar dunia.

Investasi asing langsung ke negara-negara ASEAN menunjukkan perkembangan positif. Proporsi investasi asing terhadap Produk Domestik Bruto di Kamboja merupakan tertinggi di ASEAN setelah Singapura. Seperti halnya Vietnam, ongkos yang harus dikeluarkan investor di Kamboja dan Myanmar lebih murah daripada Indonesia dan Vietnam. Salah satu indikatornya adalah upah di sektor manufaktur dan pajak korporasi di Kamboja dipatok 20% seperti halnya Vietnam sedangkan Myanmar mematok angka yang sama seperti Indonesia. Dua negara Indo China lainnya dengan investasi asing yang cukup tinggi adalah Vietnam dan Laos, sementara Philipina dan Indonesia merupakan negara dengan investasi asing yang masuk masih cukup rendah di lingkungan ASEAN. Di antara tiga negara maju ASEAN jelas sekali kemampuan unggul China dalam menarik investor asing masuk ke negaranya dibanding Jepang dan Korea Selatan.[1]

Sudah 30 tahun berlalu dan Vietnam kini menjelma sebagai salah satu negara tujuan investor. Indonesia, Singapura dan Vietnam menjadi negara yang mendominasi jumlah penerimaan investasi asing di Asia Tenggara. Tiga negara ini menguasai 72% dari total investasi asing

[1] Irfan Iskandar, *Penghantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian*, (Jakarta; Djambatan; 2001) hlm 35

yang masuk ke kawasan Asean. Penelitian yang dilakukan Bloomberg pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 41,3% responden yang merupakan para investor meyakini bahwa Vietnam merupakan negara yang paling menunjukkan kemajuan iklim usaha secara keseluruhan. Sementara itu hanya 17,4% responden yang percaya bahwa iklim usaha Indonesia paling baik di ASEAN.[2]

RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan menjadi fokus perhatian yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu Apa yang dimaksud dengan aliran hukum alam, Bagaimana Kebijakan Investasi Di Beberapa Negara ASEAN, Bagaimana Perbandingan Kebijakan Investasi Di Negara ASEAN

BATASAN MASALAH

Agar penelitian ini tidak melebar dari permasalahan yang peneliti ambil, maka peneliti membatasi permasalahan hanya kepada Kebijakan Investasi Di Beberapa Negara ASEAN, Perbandingan Kebijakan Investasi Di Negara ASEAN dengan menggunakan konsep penelitian studi pustaka.

[2] *Ibid*, hlm 37

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarkat umum dan kepada dunia pendidikan.
2. Sebagai tututan didalam penulis mengembangkan tridarma perguruan tinggi khususnya di Fakultas Hukum Universitas Asahan.
3. Untuk menambah wawasan dan bahan pembelajaran penulis dalam mata kuliah Hukum Investasi.

MANFAAT PENELITIAN

Mengetahui secara jelas Kebijakan Investasi Di Beberapa Negara ASEAN, Perbandingan Kebijakan Investasi Di Negara ASEAN dengan mengkajinya dari sumber-sumber pustaka. Dapat memberikan pengetahuan secara lebih dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dibidang ilmu hukum khususnya Kebijakan Investasi Di Beberapa Negara ASEAN, Perbandingan Kebijakan Investasi Di Negara ASEAN sebagai bekal untuk bahan penulis dan mengajar khususnya di Fakultas Hukum Universitas Asahan baik secara teori maupun praktek dilapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu dengan mengkaji

atau menganalisa data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif, komparatif dan kualitatif kemudian diduksi untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Investasi Di Beberapa Negara ASEAN

ASEAN dibentuk melalui Deklarasi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara yang dikenal dengan Dekralasi Bangkok pada tahun 1967, dengan tujuan: (1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara; (2) Memajukan perdamaian dan stabilitas regional Asia Tenggara; (3) Memajukan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) Memajukan kerjsama di bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, dan komunikasi; (5) Memajukan penelitian bersama mengenai masalah-masalah di Asia Tenggara; dan (6) Memelihara kerjsama yang lebih erat dengan organisasi internasional dan regional.[3]

Dalam literatur ekonomi makro, investasi asing dapat dilakukan dalam bentuk: Investasi portofolio, yang dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Pada jenis investasi ini investor hanya menyediakan modal keuangan dan tidak terlibat dalam manajemen. Investornya adalah investor institusional, bersifat jangka pendek, dan mudah dilikuidasi dengan cara menjual saham yang dibeli.

Investasi langsung (foreign direct investment/FDI), yang dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Pada investasi langsung, investor mengendalikan manajemen, dan biasanya dilakukan oleh perusahaan transnasional, lisensi, joint venture, atau lainnya dengan periode waktunya cukup panjang.[4]

Investasi asing langsung merupakan salah satu bentuk investasi yang telah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan pada negara penerimanya karena manfaat yang terkait dengan inovasi baru, teknologi baru, teknik manajerial, pengembangan keterampilan, meningkatkan modal, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sektor industri . Investasi asing langsung tidak hanya

[3] Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, (Bandung; Keni; 2010) hlm 34

[4] Prasetyantoko, *Krisis Finansial Dalam Perangkap Ekonomi Neoliberal*, (Jakarta; Kompas; 2009) hlm 56

membawa uang dan mesin tetapi juga keterampilan teknik sekaligus mendorong pengusaha setempat untuk bekerjasama dengan perusahaan asing. Investasi asing langsung membantu memodernisasi masyarakat dan memperkuat sektor negara maupun sektor swasta.[5] Penggunaan investasi asing langsung sangat penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi di negara-negara terbelakang maupun di negara-negara berkembang. Tetapi dalam perkembangannya investasi asing langsung masih berfluktuasi. Hal ini membuat investor asing menjadi lebih berhati-hati dalam menanamkan uangnya di beberapa negara terutama negara berkembang. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) adalah sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi yang didirikan oleh Negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di Kota Bangkok (Thailand) dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan kebudayaan Negara-negara anggotanya, menjaga stabilitas dan perdamaian serta memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk membahas perbedaan dengan damai Saat ini, Anggota ASEAN sekarang telah bertambah menjadi 10 Negara yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja.[6]

Kawasan Asia Tenggara telah menjadi suatu kawasan yang menarik sebagai tujuan investasi, sejak krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 investasi asing langsung yang masuk ke Asia Tenggara telah meningkat hampir empat kali lipat, Asia Tenggara kembali menunjukkan pesatnya perkembangan dalam menarik kepercayaan investor asing. Bahkan empat negara di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Indonesia, Thailand, dan Malaysia termasuk dalam 20 negara yang menjadi empat negara penerima investasi asing terbesar selama tahun 2010 hingga 2012. Bahkan berdasarkan survei yang dilakukan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD terhadap perusahaan-perusahaan transnational, selama tahun 2013-2015, negara di kawasan Asia Tenggara tetap tergolong ke dalam prioritas negara yang dituju sebagai host country untuk investasi asing langsung (Foreign Direct Investment = investasi asing).

Kerja sama ASEAN Plus Three (APT) adalah forum konsultasi antara ASEAN dengan negaranegara Plus Three

[5] *Ibid,* hlm 39

[6]https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2020/12/Erni-2.pdf. Diakses 8 Januari 2023 pukul 19:43 Wib

yaitu Republik Rakyat China (RRC), Jepang dan Korea Selatan. APT dibentuk pada tahun 1997 di saat kawasan Asia sedang dilanda krisis ekonomi. Adapun kehadiran format kerjasama APT ini difungsikan sebagai sarana untuk memperluas basis kerjasama perdagangan, perekonomian, serta keamanan kawasan. Kesadaran akan adanya hubungan yang kuat dalam investasi dan perdagangan antara ASEAN dengan APT terbukti pada tahun 2015, total transaksi perdagangan ASEAN dengan Jepang, Korea Selatan, dan China bernilai tak kurang dari US$ 708.6 milliar, atau setara dengan 31.1% dari total perdagangan ASEAN.[7]

B. Perbandingan Kebijakan Investasi Di Beberapa Negara ASEAN.

Vietnam

Keberhasilan Vietnam menarik investasi asing tidak bisa dilepaskan dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Pertanyaannya adalah bukankah pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan, lalu apa yang membedakan kebijakan Indonesia dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Vietnam.

Pertama, Vietnam sangat menjaga dan memperhatikan kestabilan sosio-politik. Keberhasilan pemerintah menjaga kestabilan ini yang membuat pertumbuhan ekonomi Vietnam terus bertumbuh di kisaran 7% setiap tahun, lebih tinggi dari Indonesia yang saat ini pertumbuhan ekonominya berkisar 5%.

Kedua, Vietnam memiliki banyak kerja sama perdagangan bebas dengan negara-negara sekawasan ataupun di luar kawasan. Selain sebagai bagian dari Asean Free Trade Area (AFTA) dan World Trade Organization, Vietnam juga memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Amerika Serikat dan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa yang membuat investor semakin tertarik untuk berinvestasi di Vietnam.

Ketiga, selalu terjadi perbaikan peraturan hukum yang semakin menjamin dan menguntungkan investor asing sebagai wujud dari komitmen pemerintah melindungi kepentingan investor asing.

Keempat, Pemerintah Vietnam memiliki framework yang digunakan sebagai langkah untuk terus merevitalisasi dan memperbaiki iklim usaha, framework ini dinamakan dengan “tiga terobosan”. Terobosan yang pertama adalah menempatkan lembaga ekonomi pasar dan kerangka hukum yang kuat sebagai pengontrol; membangun infrastruktur yang maju dan terintegrasi sehingga

[7] Nasarudin, Irsan dan Surya, Indra, *Aspek Hukum Pasar Modal*, (Jakarta;Kencana Preneda:2006), hlm 56

memudahkan kegiatan usaha terutama di segi transportasi; meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Kebijakan-kebijakan di atas merupakan beberapa kebijakan yang sekiranya signifikan dengan Indonesia karena selama ini Indonesia mengeluarkan kebijakan berbasis fiskal dan Vietnam pun juga melakukannya. Tapi yang bisa kita pelajari dari Vietnam adalah kebijakan fiskal saja tidak mampu menarik investor, dibutuhkan kebijakan-kebijakan lain yang mendukung agar tercipta iklim usaha yang baik.[8]

Indonesia

Indonesia mungkin agak terlalu fokus kepada pengurangan pajak, tapi pada faktanya pengurangan pajak tidak terlalu menarik bagi investor. Singapura contohnya, dengan tarif 17% rata-rata investasi asingnya dari 2015-2018 hanya sebesar 2,6% bahkan Brunei dengan tarif sekitar 18,5% pertumbuhan investasi asingnya justru menjadi minus 163,48%.

Segi upah sebenarnya Indonesia dan Vietnam tidak jauh berbeda tapi yang membedakan adalah Indonesia masih kalah dari segi tenaga kerja terampil atau (skilled labor) sehingga Indonesia menjadi agak kesulitan untuk menarik investasi yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Faktor pembeda yang selanjutnya adalah efisiensi birokrasi. Pemaparan visi dan misi Presiden Jokowi jelas menyebutkan bahwa hambatan investasi untuk masuk ke Indonesia adalah rumitnya birokrasi baik di pusat maupun daerah. Apabila Indonesia ingin meningkatkan investasi yang kemudian akan memacu pertumbuhan ekonomi seperti yang dilakukan oleh Vietnam, maka pemerintah harus segera melakukan reformasi birokrasi terutama pada masalah perizinan yang selama ini menyulitkan investor.[9]

Pemerintah Indonesia mengadakan *Internasional Infrastructure Summit* pada tanggal 17 Januari 2005 dan Bumn Summit pada tanggal 25-26 Januari 2005. *Infrastruture Summit* mengasilkan keputusan eksplisit bahwa seluruh proyek infrastruktur dibuka bagi investor asing untuk mendapatkan keuntungan tanpa pengecualian. Pemerintah juga menyatakan dengan jelas bahwa tidak akan ada pervedaan perlakuan terhadap bisnis asing yang beroperasi di indonesia.[10]

Kebijakan Investasi di Indonesia Ketentuan penanaman modal melalui Undang-Undang tentang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 telah

[8] *Ibid*, hlm 58

[9] Media Group, Pratomo, P. Eko dan Nugraha, Ubaidillah, *Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama:2009), hlm 87

[10] Mohtar Mas'oed, *Memahami investasi langsung luar negeri, handout kuliah investasi dan perdagangan*, (Yogyakarta; Program Paca Sarjana FISIPOL HI UGM, 2007)

menggantikan kebijakan lama dengan menyatukan dualisme pengaturan tentang penanaman modal yang dahulu diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UndangUndang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 telah mempertegas dan memperjelas kebijakan pengaturan penanaman modal di Indonesia. Pemerintah dalam rangka mewujudkan kebijakan penanaman modal dibuatlah suatu bentuk rencana umum penanaman modal. Dalam rencana umum penanaman modal yang akan disusun oleh pemerintah tersebut diharapkan sudah mencakup arah pengembangan penanaman modal di Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan Di Indonesia.

Laos

Laos bergabung dan membentuk Subwilayah Mekong Raya bersama dengan empat negara dalam kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan dua provinsi dalam wilayah Tiongkok. Kerja sama ini memanfaatkan Sungai Mekong sebagai sumber ekonomi bagi keenam negara ini. Negara ASEAN yang bekerja sama ialah Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam. Sedangkan Tiongkok hanya bekerja sama pada wilayah Provinsi Yunnan dan Provinsi Guangxi Zhuan. Pelopor kerja sama ekonomi sub wilayah ini adalah Bank Pembangunan Asia. Perjanjian kerja sama ditandatangani pada tahun 1992.[11]

Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan pro investasi dan insentif yang tepat untuk mendorong investor asing merealisasikan minat investasinya di Tanah Air, terutama di masa pandemi saat ini.

"Investor sudah tahu Indonesia ibarat gadis cantik. Tapi, persoalannya adalah bagaimana minat investor untuk berinvestasi itu terealisasi. Minat investasi itu harus segera direspons stakeholder. Birokrasinya harus dibuat tidak berbelit dan memudahkan maupun memenuhi kebutuhan industri," ujar Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, di Jakarta, Rabu (24/6).

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi penanaman modal asing atau PMA yang masuk ke Indonesia pada triwulan I-2020 mengalami penurunan hingga 9,2 persen dibandingkan triwulan I-2019. Investasi di sektor sekunder yang mencerminkan investasi di sektor manufaktur juga terus menurun. Padahal, di awal tahun sudah

[11] *Ibid,* hlm 89

banyak perusahaan yang dikabarkan mulai merelokasi investasinya dari Tiongkok.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa;

1. Investasi asing langsung merupakan salah satu bentuk investasi yang telah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan pada negara penerimanya karena manfaat yang terkait dengan inovasi baru, teknologi baru, teknik manajerial, pengembangan keterampilan, meningkatkan modal, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sektor industri . Investasi asing langsung tidak hanya membawa uang dan mesin tetapi juga keterampilan teknik sekaligus mendorong pengusaha setempat untuk bekerjasama dengan perusahaan asing. Investasi asing langsung membantu memodernisasi masyarakat dan memperkuat sektor negara maupun sektor swasta. Tata aturan investasi yang bebas dan terbuka merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing ASEAN dalam menarik penanaman bermodal asing langsung (foreign direct investment/FDI) termasuk investasi intra-ASEAN. Aliran masuk investasi baru dan peningkatkan investasi yang telah ada (reinvestments) akanmendorong dan menjamin pembangunan ekonomi ASEAN yang dinamis.
2. Kawasan Asia Tenggara telah menjadi suatu kawasan yang menarik sebagai tujuan investasi, sejak krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 investasi asing langsung yang masuk ke Asia Tenggara telah meningkat hampir empat kali lipat, Asia Tenggara kembali menunjukkan pesatnya perkembangan dalam menarik kepercayaan investor asing. Bahkan empat negara di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Indonesia, Thailand, dan Malaysia termasuk dalam 20 negara yang menjadi empat negara penerima investasi asing terbesar selama tahun 2010 hingga 2012. Perbandingan Kebijakan investasi di beberapa negara ASEAN yaitu beberapa negara asean berlomba-lomba untuk memperbaiki kebijakan mengenai investasi agar dapat menari para investor luar wujud dari komitmen pemerintah melindungi kepentingan investor asing.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Huala Adolf, Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO), Bandung: Keni: 2010

Prasetyantoko, Krisis Finansial Dalam Perangkap Ekonomi Neoliberal, Jakarta: Kompas: 2009

Iskandar, Irfan, Penghantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian, Jakarta:Djambatan:2001

Nasarudin, Irsan dan Surya, Indra, Aspek Hukum Pasar Modal, Kencana Preneda:2006

Media Group, Pratomo, P. Eko dan Nugraha, Ubaidillah, Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama:2009

Mohtar Mas'oed, Memahami investasi langsung luar negeri, handout kuliah investasi dan perdagangan, Yogyakarta: Program Paca Sarjana FISIPOL HI UGM: 2007

INTERNET

https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2020/12/Erni-2.pdf Diakses 8 Januari 2023 pukul 19:43 Wib